

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

(Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Talaud)

**STEFHEN TATUHE
ALDEN LALOMA
WELLY F. PESOTH**

ABSTRACT: According to law number 52 of 2009 on population development and family development, demography is the particulars relating to the number, structure, growth, distribution, mobility, deployment, quality, and welfare conditions relating to political, economic, social, cultural, religious, and neighborhood local.

From the above data, the government must take action in order to minimize the amount of population growth is very high, and one of the efforts that maximize the role of the agency or agencies competent in dealing with population growth. Family planning is one of the government's efforts to reduce the rate of population growth.

Basically the population growth in the district talaud islands can still lacking on the run, this research uses descriptive research methods, data sources/respondents were 17 government official, data collection using questionnaires and open interviews, data analysis used was qualitative descriptive statistical analysis.

The results showed: 1). The influencing factors in the increase in number of people such as marriage at an early age, lack of public awareness in running the government program and the birth rate is very high. This is what should be a task that must be resolved by the family planning agencies at both central and district in Talaud Island. 2). The limiting factor in overcoming the problem of population growth rates in the talaud island, and the factors that most hamper is a marriage that is done at an early age as well as the proximity of the child's birth due to lack maximizing government in overcome problem of overcrowding that threatened districts island talaud even when this rate of growth is not too high and still be in control.

Of the above results is concluded that the government's role in controlling the population growth in the district Talaud Island in the implementation are still lacking to participate and perform their duties according to predetermined at the center and in the regions.

Of the above conclusion, suggested the government should carry out duties according to their duty at the center and in the regions and the implementation of field extension can be done on an ongoing basis as well as the addition of personnel so as to reach all areas difficult to reach.

Keywords: Role, Control, and Population.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk.

Seperti kita ketahui masalah penduduk sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering memperbincangkan tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang

maupun memperlambat pertumbuhan penduduk.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai populasi pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Menurut data dari Tribunnews.com Indonesia berada pada posisi keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduknya sebanyak 237,6 juta jiwa.

Dari hasil data di atas pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peranan Badan atau instansi

yang kompeten dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk sebanyak 93.365 jiwa, Jumlah Penduduk Tahun 2012 sebanyak 98.010 jiwa, jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 100.516 jiwa, jumlah Penduduk pada tahun 2014 dengan jumlah Penduduk sebanyak 103.698 jiwa dan meningkat pada tahun 2015 berjumlah 107.789 jiwa. Adanya peningkatan jumlah penduduk memacu keinginan pemerintah khususnya Badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan untuk melakukan tindakan yang dapat mengontrol laju pertumbuhan penduduknya. Berdasarkan hal telah diuraikan diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Studi Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Talaud”

Peranan Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja menjalankan tugas untuk mengelolah sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara.

Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barasediakan barang-barang yang tidak di sediakan pemerintah.

Fungsi pemerintah menurut Richard A. musgrave di bedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation branch*)

Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan publik (*Public Needs*)

2. Fungsi distribusi (*distribution branch*)

Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis: yaitu pertimbangan mengenai kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas dan fungsi tersebut.

3. Fungsi stabilisasi (*stabilitazion branch*).

Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Fungsi ini bertujuan untuk memepertahakan kestabilan perekonomian. (*Stabilisator perekonomian*), (Guritno, 2002;2).

Pengertian Pengendalian.

Pengendalian menurut Ussy dan Hammer, (dalamn Darwin, Muhajir 2000) mengemukakan bahwa “*control is management’s systematic effort to achieve objectives by comparing performance to plan and taking appropriate action to correct important differences*”, maksud dari Ussy and Hammer yaitu pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting.

Glen A. Welsch, Hilton, dan Gordon yang telah di terjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw 2000:3 adalah “pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan terciptanya tujuan perusahaan”

Berdasarkan dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengendalian adalah usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan untuk mengkoreksi perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Teori kependudukan.

Teori kependudukan dikembangkan oleh dua faktor yang sangat dominan yaitu, pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para ahli dapat memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk. Sedangkan faktor kedua adalah adanya masalah-masalah *universal* yang menyebabkan para ahli harus banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Penduduk dapat dibagi sebagai berikut;

Teori pertumbuhan penduduk.

1. Marxist.

Teori ini mengemukakan bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produksi yang dihasilkan (Ida Bagoes Mantra, "demografi umum" 2000: 67).

2. Paul Edric

Dalam bukunya yang berjudul (*the population bomb*) yang menggambarkan bahwa penduduk dan lingkungan yang ada di dunia ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, keadaan bahan makanan sudah terbatas; ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun 1990 Edric merevisi bukunya dengan judul baru (*The Population Explosion*), yang isinya adalah bom penduduk yang di khawatirkan pada tahun 1968, kini sewaktu-waktu akan dapat meletus. Kerusakan dan pencemaran lingkungan parah karena sudah banyak penduduk yang sangat merisaukan (Ida Bagoes Mantra, 2000: 71).

3. Robert Thomas Malthus (1766-1834).

Menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu kependudukan yang lebih populer disebut dengan prinsip kependudukan (*the principle of population*) yang menyatakan bahwa apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan

cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini dan ia juga menyatakan bahwa manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat di banding dengan laju pertumbuhan penduduk dan apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan sehingga inilah yang menjadi sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia. (Ida Bagoes Mantra, 2000:62).

Demografi

Untuk memahami keadaan kependudukan suatu daerah atau negara maka perlu dilakukan kajian demografi. Para ahli biasanya membedakan antara ilmu kependudukan (demografi) dengan studi-studi tentang kependudukan (*population studies*).

Demografi berasal dari kata Yunani *demos*-penduduk dan *grafien* -tulisan atau dapat diartikan tulisan tentang kependudukan adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu.

Menurut Munir, dalam teori kependudukan dapat dikembangkan kemudian dipengaruhi dalam dua faktor yang sangat dominan, **pertama** ialah meningkatkan pertumbuhan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dan ini menyebabkan tantangan dari beberapa para ahli dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk. **Kedua** adalah masalah yang sifatnya universal yang menyebabkan para ahli harus lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk lebih lanjut sampai sejauh mana hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial dalam kependudukan agar dapat diterima.

Sedangkan Hauser dan Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi sebagai berikut: *Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the*

components of such changes which maybe identified as natality, teritorial movement (migration), and social mobility (change of states). Yang dalam Bahasa Indonesia adalah “Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerakan teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status).

Dari kedua definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Sedangkan studi-studi kependudukan mempelajari secara sistematis perkembangan, fenomena dan masalah-masalah penduduk dalam kaitannya dengan situasi sosial di sekitarnya.

Penduduk.

Penduduk merupakan suatu kumpulan masyarakat yang melakukan interaksinya dalam suatu daerah atau orang yang berhak tinggal daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain mendefinisikan penduduk yaitu warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan kependudukan mendefinisikan penduduk yaitu Penduduk adalah orang dalam motranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Robert Thomas Malthus, (dalam Said Rusli), mengemukakan suatu pendapat yang tercantum dalam bukunya yang berjudul “Essay On The Principle of Population” yaitu penduduk akan selalu bertambah lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan bahan makanan, kecuali terhambat oleh karena apa yang ia sebutkan sebagai moral restrains, seperti misalnya wabah penyakit atau malapetaka. Dalam pernyataan ini secara tidak langsung menyatakan kepadatan penduduk akan sulit dibendung apabila tidak ada kerjasama antara pihak yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan pertumbuhan kependudukan ini.

Permasalahan Kependudukan.

Ada beberapa hal yang dapat memepengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang ada di sekitar kita, diantaranya:

1. Tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Dalam hal ini salah satu faktor yang dapat mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatur jarak kelahiran anak, padahal pemerintah sudah menyarankan kepada masyarakat agar mengatur jaraknya yaitu dengan memanfaatkan alat kontrasepsi yang telah disediakan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk.
3. Pada indikator ini adanya ketidak pedulian masyarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh, hal ini coba diatasi pemerintah dengan cara lebih seringnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Melangsungkan pernikahan di usia yang boleh dikatakan masih remaja.

Tujuan dan manfaat kependudukan

Menurut Guilard (1885), tujuan ilmu kependudukan / ilmu demografi digunakan oleh para ahli terdiri dari empat pokok:

1. Mempelajari kualitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu.

2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia.
3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangannya penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial.
4. Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekwensinya.

Manfaat Ilmu Kependudukan

1. Perencanaan pembangunan yang berhubungan pendidikan, perpajakan, kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian dan lain-lain yang dilakukan pemerintah yang menjadi tepat sasaran jika mempertimbangkan komposisi penduduk yang ada sekarang.
2. Evaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat perubahan komposisi penduduk yang ada sekarang dan yang lalu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Melihat peningkatan standar kehidupan melalui tingkat harapan hidup rata-rata penduduk sebab tidak ada ukuran lebih baik kecuali lamanya hidup seseorang di negara yang bersangkutan.
4. Melihat seberapa cepat perkembangan perekonomian yang dilihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, industri dan jasa.

Dasar Konsep Kebijakan Kependudukan

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia mengatakan: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk masalah kebijakan keluarga pemerintah juga diatur

dalam Undang Undang ini yaitu pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pada Pasal 21 ayat (1)

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pada peraturan Presiden ini menjelaskan Tugas dan Fungsi utama dari BPPKBKS sesuai yang tertera pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat(2).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Singarimbun dan Effendy (1999) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu. Kemudian, Arikunto (2002) bahwa penelitian deskriptif-kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa, dan biasanya merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan/menguji hipotesis.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data primer yang bersumber langsung dari para informan penelitian, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian. Data sekunder hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer. Informan penelitian diambil atas pertimbangan tertentu atau berdasarkan tujuan tertentu (Sugiono, 2000). Informan penelitian diambil dari berbagai unsur/elemen yang terkait dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk yang jumlah informan ditetapkan sebanyak 17orang.

Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara terjun langsung kelapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- Wawancara atau interview yaitu dengan melakukan pertanyaan kepada informan tentang permasalahan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Adapun informan penelitian ini direncanakan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sekretaris Badan, Staf, dan masyarakat.
- Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- Studi Pustaka (*Library Study*) yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, undang-undang, peraturan-peraturan serta penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif (Arikunto, 2002), dengan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Data yang bersifat kualitatif (hasil wawancara) diproses dengan caramelakukan reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan kemudian membuat ringkasan. Hasil reduksi data digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.
2. Interpretasi hasil analisis data dan pembahasan.
3. Penyimpulan terhadap hasil analisis data dan hasil interpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Dan Fungsi Serta Tugas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kab. Kepulauan Talaud Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan

Penduduk Di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pemerintah memiliki tugas yang sangat berat dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk, sehingga pemerintah membentuk suatu badan yang di tugaskan untuk mengatasi hal tersebut yaitu BKKBN dan sesuai dengan Pepres Nomor 62 Tahun 2010. Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga telah ditetapkan strategi utama di mana BKKBN sebagai badan yang ditunjuk untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal pertumbuhan penduduk telah mengeluarkan kebijakannya yaitu, meliputi;

1. Menyeraskan kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan KB
2. Menggerakan dan memberdayakan para pemangku kepentingan (stakeholders), mitra kerja serta masyarakat
3. Menata kelembagaan
4. Memperkuat sumber daya manusia, pegawai dan tenaga penyuluh
5. Meningkatkan pembiayaan.

Melihat kebijakan di atas di tiap-tiap daerah juga memiliki kebijakan sendiri tetapi harus berdasarkan kebijakan dari pusat, salah satunya daerah Kab.Kepulauan kalimat ini di benarkan oleh kepala BKBPP Kab. Talaud bapak Suparman Panguriseng, SH, yang menyatakan: “dalam membuat program kerja di daerah harus berdasarkan perpaduan antara kebijakan nasional dan kebijakan yang ada di daerah”

Tugas, Peran dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Talaud.

Kita dapat mengeluarkan pendapat kalau laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tidak dapat kita pungkiri boleh dikatakan sangat tinggi, seperti juga yang terdapat di Sulawesi utara tapikhusus Kab. Kepulauan Talaud. Kab. Kepulauan Talaud jumlah pertumbuhan penduduknya tidaklah terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan instansi pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dari data yang diperoleh melalui metode atau cara

membagikan daftar pertanyaan kepada pegawai instansi pemerintah yang berkaitan dengan hal pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan/BKKBN di Kab. Kepulauan Talaud, sebagian besar responden mengatakan:

Jumlah penduduk khususnya di Kab. Kepulauan Talaud *“tidak cukup tinggi”* ketika menjawab pertanyaan *“Apakah menurut Bapak/ibu jumlah penduduk di Kab. Kepulauan Talaud bisa dikatakan cukup tinggi?”*.

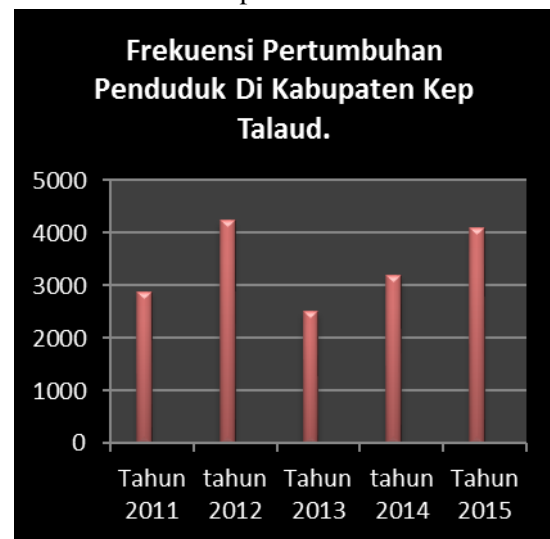
Hal ini sesuai dengan data perolehan jumlah penduduk 5 tahun terakhir di Kab. Kepulauan Talaud yang di dapatkan dari kantor BKBPP Kab. Kepulauan Talaud yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Kepulauan Talaud

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
2011	48.927 jiwa	44.346 jiwa	93.363 jiwa
2012	50.737 jiwa	47.273 jiwa	98.010 jiwa
2013	51.875 jiwa	48.681 jiwa	100.516 jiwa
2014	52.797 jiwa	50.501 jiwa	103.698 Jiwa
2015	55.607 jiwa	52.132 jiwa	107.789 Jiwa

Sumber Data : BKBPP Kab. Kepulauan Talaud 2015

Tabel 2.2 Grafik Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Tingkat Kelahiran di Kab. Kepulauan Talaud.



Sumber Data : BKBPP Kab. Kepulauan Talaud 2015

Dari tabel frekuensi dan grafik dapat kita lihat adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak terlalu signifikan, khususnya tingkat kelahiran yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud dari tahun 2011 sampai 2015 boleh dikatakan cukup berhasil meskipun mengalami naik turun tetapi masih dapat di kendalikan oleh pemerintah dalam proses penekanan jumlah penduduk.

Berdasarkan hal diatas penulis dapat mengatakan hal ini perlu dipertahankan atau bahkan di tekan agar bisa lebih baik lagi. Hal di atas juga senada dengan pendapat kepala BKBPP yang mengatakan bahwa *“Selama ini jumlah penduduk yang ada di Kabupaten kepulauan Talaud masih sedikit dan masih bisa terkendali, dan yang jelasnya komitmen pemerintah (pimpinan daerah) untuk menanggulangi masalah pertumbuhan penduduk perlu ditingkatkan”*

Pendapat kepala Kantor BKBPP hampir sama dengan pendapat yang dilontarkan Sekretaris Badan, yaitu:

“Jumlah penduduk di sebagian kawasan Kabupaten kepulauan Talaud masih dapat dikendalikan walaupun sebagian lagi masih

cukup tinggi, salah satu Kecamatan yang penduduknya masih dapat dikendalikan yaitu penduduk yang ada di Kec.Melonguane”

Selain melihat fungsi dan perannya, salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi apakah mereka berhasil atau tidak yaitu dengan menilai hasil kerja mereka dalam menjalankan tugas yang mereka miliki. Tidak terkecuali Badan Keluarga Berencana Kabupaten. Kepulauan Talaud dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang ada di kawasan Kabupaten kepulauan Talaud mereka memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan diantaranya:

Menumbuhkan Serta Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Rangka Pembudayaan Keluarga

Dalam hal ini Badan Keluarga Berencana lebih memfokuskan kepada masalah pendewasaan usia pernikahan, pengaturan kelahiran, dan pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk pendewasaan usia pernikahan Badan Keluarga Berencana memiliki batasan umur tersendiri yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan untuk wanita sendiri harus menginjak usia antara 20 - 21 tahun. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kasubid Data dan Evaluasi Program, bahwa:

Dalam menekan pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya Kabupaten. Kepulauan Talaud, Badan Keluarga Berencana memberi penekanan dalam menekan pertumbuhan penduduk hal yang dilakukan yaitu menunda usia pernikahan, bagi laki-laki dalam usia 25 tahun dan wanita dalam usia 20 tahun.

Untuk menyikapi masalah pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk, Bapak. Sarjan pade, mengungkapkan beberapa cara yang dapat kita lakukan dan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana, beliau mengatakan:

Hal-hal yang dapat dilakukan Pemerintah (BKB-PP) yaitu: Mengajak para remaja baik pria maupun wanita supaya menikah sesuai dengan usia yang di anjuran BKB-PP, Apabila pernikahan di usia muda tidak dapat dihindari di anjurkan memakai salah satu alat kontrasepsi sampai umur cukup ideal untuk melahirkan, Apabila sudah melahirkan anak pertama di harapkan untuk ber KB

Pengaturan kelahiran di sini maksudnya yaitu mengatur jarak kelahiran dari anak pertama ke anak berikutnya. Dalam hal ini pengaturan jarak kelahiran. Pemerintah (BKB-PP) memiliki cara tersendiri untuk menjalankan tugas ini, salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat dan menganjurkan masyarakat untuk mengikuti anjuran yang diberikan oleh pihak Badan Keluarga Berencana tentang pentingnya mengatur jarak kelahiran. Setelah melewati fase ini pembinaan ketahanan keluarga juga sangat penting untuk dijalankan agar supaya dapat tercipta keluarga yang sejahtera.

Berdasarkan rangkaian tugas di atas, pemerintah mempunyai bidang yang menjalankan tugas tersebut, yaitu Bidang KB dan KS. Untuk bidang KB dan KS ini sangat berpengaruh karena melalui bidang inilah kita dapat mengetahui alat-alat kontrasepsi yang baik dan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan dalam mengatur jarak kelahiran serta perencanaan keluarga yang baik, fungsi yang mereka harus jalankan yaitu diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Alat kontrasepsi yang digunakan juga sudah bertaraf internasional dan aman digunakan, tetapi harus sesuai melalui konsultasi terlebih dahulu kepada pihak yang lebih mengerti sebelum menggunakannya,

berikut ini alat-alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKBPP untuk masyarakat Kabupaten. Kepulauan Talaud

Tabel 2.3 Jumlah Pengguna Alat Kontrasepsi dan Jenis Kontrasepsi di Kabupaten. Kepulauan Talaud Tahun 2015

Jenis Alat Kontrasepsi	Jumlah	Ket
IUD	190	
MOP	3	
MOW	207	
IMPLANT	206	
SUNTIK	838	
PIL	769	
KONDOM	577	

Sumber Data : BKBPP Kabupaten. Kepulauan Talaud 2015

Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan

Pada dasarnya perempuan merupakan sosok yang boleh dikatakan lebih lemah dari pihak laki-laki. Oleh karena itu sebagian besar kalangan wanita lebih bergantung dari pihak laki-laki apalagi yang sudah menjalini kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga wanita sangat berpengaruh dalam proses peningkatan jumlah penduduk, hal inilah yang mendorong Badan Keluarga Berencana untuk melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan menyetarakan gender. Hal ini dilakukan dengan harapan perempuan dapat mengurangi ketergantungan dari pihak laki-laki terutama dalam urusan jumlah keturunan. Selain itu perlunya pemberdayaan perempuan juga dikemukakan oleh Kabid.

Pemberdayaan Perempuan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten. Kepulauan Talaud, beliau mengungkapkan, Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk: Memperbaiki kehidupan perempuan dalam pembangunan, Untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam pembangunan dan Mengejar kesetaraan

gender yaitu kesetaraan perempuan dan laki-laki

Dari hal yang disampaikan oleh Kabid PP dapat dilihat bahwa perempuan harus menyetarakan kedudukannya dengan pihak laki-laki, sehingga dengan adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan inilah pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan masing-masing pihak yang secara tidak langsung keinginan untuk dapat memiliki keturunan dapat diatur sesuai dengan hasil kesepakatan yang dibuat antara kedua pihak (wanita dan laki-laki). Hal ini juga diungkapkan oleh staf BKKBN pada saat wawancara, bahwa:

Dengan adanya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan karena salah satu yang dapat mendukung adalah kesepakatan dalam merencanakan keluarga dapat mempengaruhi dimana hak dan kewajiban sudah setara antara suami dan isteri sehingga sangat memperhatikan adanya keadilan dalam rumah tangga.

Dari pendapat diatas dapat kita katakan bahwa wanita sangatlah penting dalam kehidupan dan sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah penduduk apakah akan bertambah atau dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan Badan Keluarga Berencana.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten. Kepulauan Talaud masih perlu untuk di kendalikan walaupun jumlahnya boleh dikatakan tidak terlalu tinggi meskipun ada peningkatan jumlah penduduknya dua tahun kemarin antara tahun 2011 sampai tahun 2015, untuk mengatasinya atau menstabilkan jumlah pertumbuhan penduduk ada beberapa terobosan program kerja yang dikeluarkan oleh pihak Badan Keluarga Berencana, dan disinilah kita dapat melihat peran yang sangat penting di pegang oleh Badan Keluarga Berencana untuk mengatasi masalah ini di antaranya: a). Sebagai instansi utama pembuat program

penanggulangan masalah kependudukan. b). Sebagai instansi yang terjun langsung dalam penyuluhan masalah kependudukan. c). sebagai penyedia data jumlah penduduk terlepas dari itu kita juga harus mengingat kalau peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Wakil kepala BKB Kabupaten. Kepulauan Talaud Bapak Frans. Wiel, lua. yang mengatakan:

“Semakin berkomitmennya pimpinan daerah untuk menaggulangi masalah kependudukan maka program yang diberikan oleh BKBPP pasti dia (pemerintah daerah) akan terima dan penerimaannya itu sesuai dengan APBD yang ada”

Pendapat kepala BKB Kabupaten. Kepulauan Talaud juga dikuatkan dengan pendapat Kasubag Perencanaan) yaitu:

“Pemerintah (pemerintah daerah) harus mendukung sepenuhnya program Badan Keluarga Berencana khususnya masalah Keluarga Berencana di Kabupaten. Kepulauan Talaud”

Berdasarkan uraian dan program yang telah ada di atas dapat kita katakan bahwa fungsi dan peran Badan Keluarga Berencana sangatlah penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dari fungsi yang dikemukakan di atas tadi, apabila dapat berjalan dengan baik sudah dapat dipastikan bahwa pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Selain itu tujuan dari fungsi yang di atas tadi sesuai dengan fungsi yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada Pasal 3 ayat (1) poin a yang berbunyi: Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraankeluarga berencana.

Selain fungsi yang mereka jalankan, peran yang dimiliki Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk juga harus diperhatikan, fungsi ini baru bisa dikatakan

berjalan dengan baik ketika sudah menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ada. Salah satu cara untuk menunjukkan perannya yaitu dengan menjalankan program kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Keberhasilan program pemerintah utamanya program Badan Keluarga Berencana dalam mengendalikan jumlah penduduk sangat bergantung dari ikut sertanya dan kesadaran seluruh masyarakat di daerah Kabupaten. Kepulauan Talaud dan detailnya untuk masyarakat Kabupaten. Kepulauan Talaud. Salah satu jalan yang dapat ditempuh yaitu sosialisasi langsung atau dengan kata lain terjun langsung dan bertemu langsung dengan objek yang akan diberikan pengarahan yaitu masyarakat sendiri untuk melakukan pengenalan.

Terhadap program yang akan diterapkan. Sosialisasi ini dianggap sangat efektif untuk diterapkan bukan hanya Badan Keluarga Berencana yang melakukan hal ini tetapi hampir semua instansi melakukannya untuk mengenalkan program mereka masing-masing. Dalam hal pengendalian penduduk, sosialisasi sangat dibutuhkan dan Badan Keluarga Berencana meresponnya dengan membentuk tim penyuluh yang langsung terjun ke masyarakat untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat. Di samping tenaga penyuluh yang masih kurang serta letak topografi Kabupaten. Kepulauan Talaud yang terkenal dengan kawasan pegunungannya, alokasi dana dari pemerintah daerah juga sangat penting dalam proses penyuluhan ini. Dengan adanya komitmen serius dari pemerintah daerah untuk menaggulangi masalah kependudukan ini akan mudah juga dana kegiatan akan diperoleh. Namun yang terjadi di lapangan dana yang dikeluarkan untuk tiap penyuluhan masih sangat minim, hal ini juga diungkapkan oleh kepala Badan Keluarga Berencana bahwa:

“untuk dana yang dialokasikan kepada kita (Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan) dari pemerintah daerah masih sangat minim”

Disamping itu adanya penyimpangan alokasi dana yang dilakukan oleh Kabid kepada Staf pelaksana juga menjadi hambatan yang sangat berpengaruh, dan bisa jadi mengakibatkan keterlambatan dalam melaksanakan penyuluhan sehingga program pemerintah tertunda pelaksanaannya.

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Peningkatan Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten. Kepulauan Talaud

Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tidak terkecuali di Kabupaten. Kepulauan Talaud. Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten. Kepulauan Talaud tidak terlalu signifikan dan masih dapat dikendalikan, berkaitan dengan masalah peningkatan jumlah penduduk tersebut terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh yang bisa menjadi penyebab utamanya, beberapa faktor tersebut diantaranya:

Pernikahan Yang Dilakukan Pada Usia Yang Masih Muda (pernikahan usia dini)

Menurut pandangan beberapa kalangan, pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dilakukan, sehingga sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan kita harus memikirkannya secara matang dan baik sehingga dapat terskema dengan baik. Terlepas dari itu pemerintah pusat juga membuat peraturan mengenai masalah pernikahan yang tertuang dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan Undang Undang di atas, hal tersebut dapat memicu terjadinya pernikahan usia yang boleh dikatakan remaja. Hal ini senada dengan yang diungkapkan KaBid. Data dan Informasi, bahwa:

“usia pernikahan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai dengan keinginan Badan Keluarga Berencana, sebab keinginan BKB usia perkawinan yang ideal adalah umur 25 tahun bagi pria dan umur 21 tahun. Apabila peraturan pemerintah mengenai usia pernikahan (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) sangat beresiko tinggi untuk menambah jumlah pertumbuhan penduduk.”

Menurut Sanderowitz dan Paxman, pernikahan di usia muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Disamping itu adanya campur tangan orang tua dalam urusan pernikahan anak mereka juga dapat menimbulkan terjadinya pernikahan yang sangat cepat.

Untuk di kawasan daerah-daerah pedalaman memiliki permasalahan mengenai pernikahan usia dini yang berbeda, masih rendahnya kualitas ekonomi dan kesenjangan pendidikan masih merupakan hal memicu terjadinya pernikahan di usia muda. Hal ini disebabkan karena lokasi penyuluhannya sangat sulit untuk dijangkau, karena akses menuju daerah tersebut masih kurang memadai. Letak topografi Kab. Kepulauan Talaud yang berada di kawasan Pegunungan sangat mempengaruhi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Kepala KBPP Kab. Kepulauan Talaud yaitu :

“untuk wilayah seperti daerah kita (daerah perbukitan) efesiennya satu penyuluh untuk tiga desa, tidak sama dengan daerah yang topografinya rata mereka bisa mengadakan penyuluhan lima desa sekaligus dengan menggunakan satu tenaga penyuluh”.

Minimnya Pemanfaatan Program Pemerintah

Masalah lain yang timbul dimasyarakat pada umumnya yang dapat memicu peningkatan jumlah penduduk adalah

minimnya pemanfaatan program pemerinah, dan salah satu programnya yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini berbanding terbalik dari program Badan Keluarga Berencana Yaitu “Dua Anak Lebih Baik”. Adanya perbedaan tingkat pola pikir masyarakat mengenai alat kontrasepsi menjadi pemicu utama, misalnya; Kurang pahamnya masyarakat tertentu tentang alat kontrasepsi, Kurang mengetahui kegunaan alat kontrasepsi, Ketakutan untuk menggunakan alat kontrasepsi, Kesadaran masyarakat terhadap ledakan penduduk

Tingkat Kelahiran Yang Sangat Tinggi

Tingkat keberhasilan program pemerintah dalam mengatasi laju/ledakan penduduk masih sangat minim. Salah satu pemicunya adalah jumlah kelahiran dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dikarenakan dua hal dia atas yaitu pernikahan yang dilakukan di usia muda dan tingkat penggunaan alat kontrasepsi yang masih rendah. Dalam hal tingkat kelahiran ini tidak teraturnya jarak kelahiran dari anak yang satu keanak yang berikutnya menjadi faktornya, karena dengan tidak terkontrolnya jarak kelahiran ini kita tidak tahu lagi berapa banyak jumlah penduduk Indonesia nantinya pada umumnya tidak terkecuali Kabupaten. Kepulauan Talaud sendiri. Selain itu partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan yang patut diperhatikan, masih adanya pemikiran masyarakat bahwa “*banyak anak banyak rejeki*” masih menghambat keberhasilan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah (BKBPP/BKKBN) Kabupaten. Kepulauan Talaud. Pola pemikiran inilah yang menjadi pekerjaan dan harus cepat dihilangkan masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang ada di kawasan yang sulit dijangkau. Selain itu masyarakat yang ada didaerah juga masih kurang memahami pentingnya berKB sesuai dengan keinginan pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan diatas maka penulis berkesimpulan:

1. Adanya faktor yang berpengaruh dalam peningkatan jumlah penduduk seperti pernikahan diusia dini, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program pemerintah serta tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Hal inilah yang menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Badan Keluarga Berencan baik di pusat maupun yang adad di daerah Kab. kepulauan Talaud
2. Tugas yang harus dijalankan serta fungsi dan Peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sangat penting dalam menanggulangi masalah kepadatan penduduk/ledakan penduduk yang ada di kabupaten Kabupaten Kepulauan Talaud, di samping itu peran Pemerintah daerah juga sangat berpengaruh demi kelancaran program-program yang diajukan oleh BKBPP.
3. Ada beberapa faktor penghambat dalam mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk di kabupaten kepulauan Talaud, dan faktor yang paling berpengaruh adalah pernikahan yang terjadi diusia dini, serta dekatnya jarak kelahiran anak karena kurang memaksimalkan program pemerintah dalam penggulangan masalah ini terutama program pemerintah yaitu penggunaan alat kontrasepsi
4. Pembuatan program kerja oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat menjadi patokan untuk menaggulangi masalah kepadatan penduduk yang mengancam daerah kabupaten kepulauan Talaud meskipun pada saat ini laju pertumbuhannya tidak terlalu tinggi dan masih dapat dikendalikan
5. Dalam menjalankan program yang telah dibuat dan disetujui oleh pemerintah daerah, ada beberapa hambatan yang didapatkan dan yang paling menonjol yaitu keadaan topografi wilayah kabupaten kepulauan Talaud yang berada pada kawasan berbukit sehingga dalam proses penyuluhan agak sulit dilakukan, apalagi ketika memasuki daerah yang sulit untuk dijangkau.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah bahwa:

1. Pemerintah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dari pusat maupun yang ada di daerah
2. Fungsi dan peran Badan Keluarga Berencana harus berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing guna untuk mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk
3. Dalam pelaksanaan usulan program kerja pemerintah daerah harus mendukung sepenuhnya program tersebut tetapi harus melihat anggaran APBD yang ada
4. Dalam proses pelaksanaan program kerja, diharapkan keikutsertaan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik serta menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik dan sesuai dengan apa yang diusung oleh pemerintah.
5. Proses pelaksanaan penyuluhan lapangan dapat dilakukan secara berkesinambungan serta adanya penambahan posenil sehingga dapat menjangkau seluruh kawasan yang tadinya sulit untuk dijangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Achilie Guillard, 2007, *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta; Universitas Indonesia.
- Bagoes Mantra, Ida, 2000, *Demografi Umum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Darwin, Muhadjir, 2000, *Aspek Kemanusiaan Dalam Pengendalian Pertumbuhan penduduk*, Aditya Media
- Haris, Abdul & Nyoman Andika (Editor). 2003, *Dinamika Kependudukan Dan Pembangunan Di Indonesia: Dari Perspektif Makro Ke Realitas Mikro*. Lesfi.
- Rozi Munir, *Teori – Teori Kependudukan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983
- _____. 2009, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Said Rusli, 2012, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta, LP3ES.
- Sunarto, Kamanto. 2004 *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiono, 2000, *Metodeologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2004 *Kependudukan Birokrasi Dan Reformasi Ekonomi*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Sumber-sumber lain :**
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain mendefenisikan penduduk
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.